

PENDIDIKAN POLITIK MELALUI PENGUATAN LITERASI DIGITAL DALAM PROSES PEMBELAJARAN MATA KULIAH PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Political Education Through Strengthening Digital Literacy in the Learning Process of Civic Education Courses

Erna Yuliandari¹, Moh. Muchtarom², Pipit Widiatmaka³

^{1,2}Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, FKIP, Universitas Sebelas Maret
Jl. Ir. Sutami 36 Kentingan, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah.
Indonesia, 57126

³Pendidikan Bahasa Arab, FTIK, Instiut Agama Islam Negeri Pontianak
Jl. Letjend Soeprapto, No. 19 Benua Melayu Darat, Pontianak, Kalimantan Barat,
Indonesia, 78122

ABSTRACT:

In the 2019 general election, many students were disqualified and took a stand of apathy towards the interests of the nation and the state, because they got information from social media whose existence could not be accounted for so it was very necessary to carry out political education through civic education by utilizing digital literacy. This research aims to find out 1) the importance of political education for students through civic education courses, 2) political education strategies through digital literacy in the learning process, and 3) obstacles to political education through digital literacy in the learning process. This research uses a qualitative approach with a descriptive research method. The data collection technique uses interviews, observations, and document studies, and the data analysis used is interactive. The results showed that the civic education course is very effectively used as a vehicle for political education for students, considering that the content of the material is related to the rights and obligations of citizens, the state of law, democracy, and so on. A lecturer's strategy in providing political education through digital literacy is that lecturers present material related to political education by utilizing digital technology, using varied learning methods, utilizing political issues that are currently hot to be

Keywords:

political education; digital literacy; learning process; civic education

Kata kunci:

pendidikan politik; literasi digital; proses pembelajaran; pendidikan kewarganegaraan

discussed and analyzed, providing space for students to discuss, utilizing social media as a learning medium, and providing motivation and inspiration. The obstacles experienced in the political education process are that some students still use their mobile phones to play games, limited time in the learning process, limited student knowledge related to the technology used, and lack of focus when the learning process is carried out online.

ABSTRAK:

Pemilihan umum tahun 2019 banyak mahasiswa yang golongan putih dan mengambil sikap apatis terhadap kepentingan bangsa dan negara, karena mendapatkan informasi dari media sosial yang keberannya belum bisa dipertanggungjawabkan sehingga sangat perlu dilakukan pendidikan politik melalui pendidikan kewarganegaraan dengan memanfaatkan literasi digital. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui 1) pentingnya pendidikan politik bagi mahasiswa melalui mata kuliah pendidikan kewarganegaraan, 2) strategi pendidikan politik melalui literasi digital dalam proses pembelajaran, dan 3) kendala pendidikan politik melalui literasi digital dalam proses pembelajaran. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan studi dokumen serta analisis data yang digunakan adalah analisis data interaktif. Pendidikan kewarganegaraan sangat penting dan efektif digunakan sebagai wahana pendidikan politik bagi mahasiswa, mengingat muatan materinya berkaitan dengan hak dan kewajiban warga negara, negara hukum, demokrasi dan lain sebagainya. Strategi seorang dosen dalam memberikan pendidikan politik melalui literasi digital yaitu dosen mempresentasikan materi terkait pendidikan politik dengan memanfaatkan media digital, menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi, memanfaatkan isu-isu politik yang sedang hangat untuk didiskusikan dan dianalisis, memberikan ruang kepada mahasiswa untuk berdiskusi, memanfaatkan media sosial sebagai media pembelajaran, dan memberi motivasi dan inspirasi. Kendala yang dialami dalam proses pendidikan politik yaitu masih ada beberapa

mahasiswa yang memanfaatkan ponselnya untuk bermain game, keterbatasan waktu dalam proses pembelajaran, keterbatasan pengetahuan mahasiswa terkait teknologi yang digunakan, dan kurang fokus ketika proses pembelajaran dilakukan secara *daring*.

PENDAHULUAN

Pemilihan umum tahun 2024 merupakan suatu kontestasi politik yang sangat penting bagi masa depan rakyat Indonesia untuk memilih pemimpin bangsa Indonesia terutama Presiden dan Wakil Presiden. Pemilihan umum tahun 2024 seiring berjalannya waktu semakin dekat, sehingga perlu adanya suatu gerakan secara massal, baik dari pemerintah, penyelenggara dan pengawas pemilihan umum, masyarakat dan lain sebagainya dalam rangka untuk meyukseskan pemilihan umum tersebut. Pemilihan umum menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 17 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjelaskan bahwa “Pemilihan umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam

Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Di sisi lain, meskipun Indonesia adalah negara yang beragam atau multikultural, namun setiap warga negara memiliki hak yang sama dan tidak membatasi setiap warga negara untuk menjadi peserta pemilihan umum (Nuryadi, Zamroni, and Suharno 2020).

Pemilihan umum pada dasarnya dapat dimaknai sebagai bentuk upaya untuk mewujudkan suatu relasi yang demokratis antara warga negara dengan negara atau pemerintah, mengingat Indonesia adalah negara yang menganut sistem politik demokrasi, yang kedaulatan tertinggi di dipegang oleh rakyat (Bachmid 2020). Pemilihan umum tahun 2024 mendatang akan dilaksanakan secara serentak, seperti halnya di pemilihan umum tahun 2019. Sosialisasi pemilihan umum 2019 sebagai pendidikan politik dilakukan oleh berbagai pihak (pemerintah, partai politik, dan lembaga swasta) sebelum diselenggarakannya pemilihan umum 2019. Sosialisasi pemilihan umum

merupakan suatu proses dalam membentuk dan mengembangkan kompetensi kewarganegaraan bagi setiap warga negara sehingga dapat memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara (Aprilia and Azmi 2021).

Sosialisasi pemilihan umum pada dasarnya merupakan salah satu bentuk pendidikan politik. Pendidikan politik sendiri merupakan suatu proses pembelajaran yang berusaha untuk memberikan pemahaman terkait hak dan kewajiban sebagai warga negara (Hardian et al. 2021). Adanya sosialisasi pemilihan umum tahun 2019 seharusnya tingkat partisipasi politik dalam pemilihan umum semakin meningkat dan golongan putih semakin rendah. Golongan putih adalah orang yang tidak menggunakan hak pilihnya dalam proses pemilihan umum, baik yang disengaja maupun tidak sengaja (Yuliono 2013). Namun tingkat golongan putih pada pemilihan umum tahun 2019 masih tergolong tinggi, apabila dibandingkan dengan pemilihan umum sebelumnya yang tergolong menurun. Berdasarkan data dari Lingkaran Survei Indonesia, angka golongan putih dalam pemilihan umum tahun 2019 masih tergolong tinggi, meskipun apabila dibandingkan dengan pemilihan

umum sebelumnya angka golongan putih sudah menurun. Golongan putih dalam pilpres tahun 2019 mencapai angka 19,27 persen, sedangkan di dalam pileg tahun 2019 mencapai angka 30,05 persen (Safitri 2019). Angka golongan putih tersebut sebenarnya sebagai dasar bagi pemerintah, penyelenggara pemilihan umum (KPU), dan lain sebagainya untuk bahan evaluasi untuk menyusun strategi memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar angka golongan putih tersebut dapat menurun bahkan hingga tidak ada yang golongan putih.

Pemilihan umum tahun 2024 mendatang diprediksi pemilih pemula atau generasi milenial yang di dalam kehidupan sehari-hari tidak bisa lepas dengan ponselnya. Saat ini sebagian besar generasi milenial sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi atau mahasiswa yang memiliki permasalahan terkait pemilihan umum karena mudah dipengaruhi dengan isu-isu yang kebenarannya masih diragukan melalui media sosial (Ahmad, Alvi, and Ittefaq 2019). Ada beberapa permasalahan bagi mahasiswa sebagai pemilih pemula yaitu pemilih pemula merupakan orang yang labil dan emosional sehingga mudah dipolitisasi oleh elit politik, dijadikan sebagai komoditas politik untuk mendongkrak

elektabilitas dalam pemilihan umum, mudah dimobilisasi oleh elit politik, dan banyak yang apatis terhadap kepentingan negara sehingga golongan putih dalam pemilihan umum (Azirah 2019). Di sisi lain, saat ini adalah era digital yang memudahkan segala kalangan untuk mengakses informasi melalui internet khususnya media sosial (Pratiwi and Purnama 2022). Mahasiswa sendiri merupakan generasi yang tidak bisa lepas dengan ponselnya (Ekayana 2022), sehingga sangat mudah dipolitisasi oleh elit politik melalui media sosial. Permasalahan tersebut harus segera diantisipasi agar pemilihan umum 2024 mendatang berjalan dengan aman dan kondusif serta angka golongan putih semakin rendah.

Mahasiswa merupakan pemuda yang idealis dan mendapatkan pendidikan dari perguruan tinggi yang seharusnya lebih memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara sehingga tidak mudah dipolitisasi oleh elit politik terutama ketika akan diselenggarakannya pemilihan umum, namun banyak data yang menunjukkan mahasiswa mudah dipengaruhi oleh elit politik sehingga melakukan tindakan yang melawan hukum (Anggraeni and Adrinoviarini 2020). Proses pembelajaran di perguruan tinggi

merupakan wahana pendidikan politik yang sangat efektif untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa terkait hak dan kewajiban sebagai warga negara khususnya melalui mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Mata kuliah tersebut merupakan mata kuliah wajib yang harus diberikan kepada mahasiswa di semua program studi (Nuryadi and Widiatmaka 2022).

Pendidikan politik melalui pendidikan kewarganegaraan dengan memanfaatkan literasi digital menjadi sangat penting terutama untuk memudahkan dalam memberikan pemahaman kepada mahasiswa terkait hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Di sisi lain, peran literasi dalam hal ini sangat penting bagi mahasiswa (Dewi, Sumarno, and Susarno 2022), mengingat banyak mahasiswa yang mudah terpengaruh dengan informasi yang kebenarannya tidak bisa dipertanggungjawabkan (berita *hoax*) terutama melalui media sosial (Widiatmaka and Shofa 2022). Hal ini memiliki arti bahwa literasi digital memiliki peran yang sangat penting untuk meningkatkan pemahaman kepada mahasiswa terkait hak dan kewajiban sebagai warga negara. literasi digital adalah kemampuan dalam memanfaatkan teknologi digital, untuk menemukan, memanfaatkan, melakukan evaluasi,

dan berkomunikasi terkait informasi, dengan kompetensi kognitif maupun teknikal (Wahyudi 2021).

Berdasarkan observasi awal di lapangan banyak mahasiswa Universitas Sebelas Maret yang mudah terpengaruh dengan informasi yang kebenarannya belum bisa dipertanggungjawabkan (berita hoax), sehingga banyak mahasiswa bersikap apatis terhadap kepentingan negara, terutama ketika berkembangnya berita hoax Jokowi yang menginginkan untuk melanjutkan tiga periode demi proyek infrastruktur nasional, hal tersebut dapat berpotensi di pemilihan umum 2024 para mahasiswa mengambil langkah untuk menjadi golongan putih. Berita hoax tersebut ternyata dapat mempengaruhi pandangan mahasiswa terkait adanya oknum pejabat pemerintah yang hanya lebih mementingkan kepentingan kelompoknya dari pada kepentingan rakyat. Hal tersebut menunjukkan bahwa literasi mahasiswa masih kurang sehingga mudah terpengaruh dengan berita *hoax*.

Penelitian terdahulu pernah dilakukan oleh Rahman pada tahun 2018 yang mengkaji tentang konsep dasar pendidikan politik bagi pemilih pemula melalui pendidikan kewarganegaraan. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa pendidikan kewarganegaraan memiliki peran yang sangat penting sebagai pendidikan politik bagi pemilih pemula untuk memberikan pemahaman terkait hak dan kewajiban sebagai warga negara sehingga pemilih pemula tersebut dapat melakukan partisipasi politik secara maksimal (Rahman 2018). Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Juwandi dkk pada tahun 2019 yang mengkaji terkait media sosial sebagai sarana pendidikan politik untuk mengembangkan literasi digital warga negara. Hasil penelitian menunjukkan media sosial sangat efektif untuk pendidikan politik, meskipun terkadang dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab terutama ketika akan diselenggarakan pemilihan umum tahun 2019. Namun, pada dasarnya media sosial dapat meningkatkan partisipasi politik generasi muda yang merupakan pemilih pemula (Juwandi, Nurwahid, and Lestari 2019).

Kedua penelitian tersebut memiliki perbedaan dengan penelitian ini, penelitian yang dilakukan Rahman tidak mengkaji tentang literasi digital, seangkan penelitian yang dilakukan oleh Juwandi dkk, tidak mengkaji tentang pembelajaran pendidikan kewarganegaraan, sehingga penelitian sangat penting

untuk dilakukan mengingat pentingnya pendidikan politik melalui literasi digital dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Melalui pendidikan politik setiap mahasiswa dapat memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara Indonesia sehingga dapat menjadi warga negara yang baik dan cerdas. Selain itu, mengingat pemilihan umum tahun 2024 semakin mendekat sehingga pendidikan politik dapat memberikan sumbangsih untuk meningkatkan partisipasi politik bagi mahasiswa.

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan yaitu untuk mengetahui bahwa pendidikan kewarganegaraan sebagai wahana pendidikan politik, strategi dosen pendidikan kewarganegaraan dalam memberikan pendidikan politik melalui literasi digital, dan kendala yang dialami oleh dosen pendidikan kewarganegaraan dalam memberikan pendidikan politik melalui literasi digital.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif. Penelitian dilakukan di beberapa program studi di lingkungan Universitas Sebelas Maret, yaitu

Program studi D-3 Kebidanan, D-3 Manajemen Pemasaran, dan di Agroteknologi, kemudian obyek penelitian dalam penelitian ini adalah mahasiswa yang mengambil mata kuliah umum pendidikan kewarganegaraan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini ialah wawancara mendalam (2 Dosen mata kuliah pendidikan kewarganegaraan dan 6 mahasiswa yang sudah mengambil mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan), observasi (proses pembelajaran dan interaksi antar mahasiswa di program studi D-3 Kebidanan, D-3 Manajemen Pemasaran, dan di Agroteknologi), dan studi dokumen (Rencana Pembelajaran Semester mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, artikel jurnal, proseding, buku, berita online, dan lain sebagainya).

Penelitian terkait penguatan pendidikan politik melalui literasi digital ini menggunakan triangulasi metode, sehingga peneliti mengecek data dari wawancara, observasi dan studi dokumen, hasilnya data-data tersebut selaras dan tidak ada yang bertentangan antara data dari wawancara dengan data dari observasi dan studi dokumen.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data interaktif. Langkah-langkah di dalam

penelitian yaitu pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan melakukan penarikan kesimpulan (Miles, Huberman & Saldana 2014). Langkah-langkah analisis data dalam penelitian ini, apabila mengacu pada analisis data interaktif, yaitu 1) pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan studi dokumen, 2) melakukan pemilahan data atau memberi kode pada setiap data terutama data yang dibutuhkan, 3) menyajikan data yang sudah diberi data untuk dilakukan analisis, dan 4) setelah dilakukan analisis data, maka dilakukanlah penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pentingnya Pendidikan Politik

Melalui Pendidikan

Kewarganegaraan Bagi Mahasiswa

Pendidikan politik merupakan salah satu implementasi dari pendidikan politik, selain itu pendidikan politik juga memiliki beberapa fungsi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat Indonesia, 1) sebagai sarana untuk membangun karakter bangsa, 2) sebagai sarana untuk membangun kesadaran masyarakat untuk berpolitik, 3) sebagai sarana untuk membentuk kader partai politik, sehingga partai politik memiliki kader yang berkualitas dan berintegritas, 4)

sebagai sarana untuk internalisasi ideologi Pancasila (Nurdiansyah 2015). Pada dasarnya pendidikan politik sangat penting diimplementasikan di dalam proses pembelajaran mata kuliah pendidikan kewarganegaraan untuk membangun generasi muda yang aktif dalam membangun kesejahteraan masyarakat dan memiliki karakter Pancasila. Berdasarkan wawancara dengan dosen yang mengampu mata kuliah pendidikan kewarganegaraan di Universitas Sebelas Maret (Nuryadi) menunjukkan bahwa peran dosen dalam melakukan pendidikan politik sangat penting, mengingat Indonesia di tahun 2024 akan menyelenggarakan pemilihan umum, pendidikan kewarganegaraan sangat efektif difungsikan sebagai pendidikan politik karena materi di dalamnya selalu berkaitan dengan hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Literasi digital sendiri merupakan media pembelajaran sangat penting karena mahasiswa saat ini termasuk generasi milenial yang waktunya dihabiskan untuk mengakses informasi melalui ponsel, baik media sosial atau yang lainnya. kuncinya pendidikan politik bagi mahasiswa dengan memanfaatkan media literasi digital sangat efektif, dan harapannya tingkat golongan putih di pemilihan umum 2024

mendatang bisa menurun secara drastis dan dapat mengantisipasi terjadinya korupsi di Indonesia, politik uang dan politisasi SARA.

Hasil survey dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia menunjukkan di dalam pemilihan umum tahun 2019 diperoleh data bahwa 40% Masyarakat Indonesia menerima uang (amplop) dari peserta kontestasi pemilihan umum 2019 dan 37% masyarakat Indonesia mengakui untuk menerima uang tersebut dan memutuskan untuk memilih peserta pemilihan umum yang memberikan uang (Pahlevi and Amrullohi 2020). Berdasarkan pengalaman di dalam pemilihan umum di tahun 2019 menunjukkan bahwa pendidikan politik sangat penting dan harus dilakukan oleh setiap guru dan dosen untuk membangun generasi muda yang aktif dalam berpartisipasi politik, berkarakter dan mengutamakan kepentingan bersama dari pada kepentingan pribadi. Metode pendidikan politik dapat melalui berbagai cara dan dapat dibagi menjadi tiga macam cara untuk mengimplementasikan pendidikan politik, yaitu pendidikan politik melalui pendidikan formal, pendidikan informal, dan pendidikan non-formal (Handoyo and Lestari 2017). Bagi mahasiswa pendidikan politik dapat dilakukan melalui

pendidikan formal atau melalui mata kuliah tertentu, sehingga pendidikan politik sangat efektif diimplementasikan melalui mata kuliah pendidikan kewarganegaraan.

Pendidikan kewarganegaraan merupakan mata kuliah umum yang wajib diberikan oleh setiap mahasiswa di seluruh program studi di Indonesia, karena Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamantkan pendidikan kewarganegaraan adalah mata kuliah wajib (Widiatmaka and Purwoko 2021). Pendidikan kewarganegaraan sendiri selalu berusaha untuk mengembangkan kompetensi mahasiswa, yaitu *civic knowledge* (pengetahuan kewarganegaraan), *civic skills* (keterampilan kewarganegaraan), dan *civic disposition* (kepribadian atau karakter kewarganegaraan) (Winarno et al. 2020). Selain itu, pendidikan kewarganegaraan dapat difungsikan sebagai pendidikan politik untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa terkait hak dan kewajiban sebagai warga negara serta dapat meningkatkan partisipasi politik bagi mahasiswa. Pendidikan politik adalah suatu kegiatan atau aktifitas yang bertujuan untuk membentuk orientasi politik dan moral di dalam diri setiap orang sehingga dapat berpartisipasi dengan maksimal terkait kepentingan

masyarakat dan negara (Dewantara et al. 2019). Pemahaman politik bagi mahasiswa melalui mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan merupakan kajian tentang demokrasi politik (Winarno 2019). Hal ini menunjukkan bahwa melalui pendidikan politik, diharapkan menjadi warga negara yang demokratis yang memahami hak dan kewajiban serta memahami sesuatu yang boleh dilakukan dan dilarang oleh aturan.

Pentingnya pendidikan politik pada generasi penerus bangsa khususnya mahasiswa yaitu untuk meningkatkan tingkat kesadaran politik. Seseorang semakin cepat mendapat pendidikan politik, maka semakin tinggi kesadaran politiknya untuk berpartisipasi dan bertanggung jawab sebagai warga negara yang baik. Pendidikan politik pada dasarnya memiliki peran yang besar dalam mendidik generasi muda agar mendapatkan pemahaman yang baik dari segi konsep dan implementasi terkait politik (Rahman and Suharno 2020). Berdasarkan wawancara dengan Dita Hairani (mahasiswa dari program studi D-3 Kebidanan) dan Andi Dewantara (mahasiswa D-3 Manajemen Pemasaran) menunjukkan bahwa pendidikan politik bagi generasi muda sangat penting dan harus dilakukan secara

berkesinambungan dan proses pendewasaan warga negara tidak terputus sehingga generasi muda memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara serta partisipasi politik semakin meningkat. Pendidikan politik melalui mata kuliah pendidikan kewarganegaraan sangat efektif dan penting mengingat banyak materi yang terkait hak dan kewajiban sebagai warga negara, peraturan perundang undangan, identitas nasional dan lain sebagainya. Selain itu, adanya perkembangan teknologi pendidikan politik melalui pendidikan kewarganegaraan tidak hanya dilakukan di dunia nyata saja. Hal ini mendorong banyak orang khususnya mahasiswa untuk selalu mengembangkan kemampuan digital agar dapat memanfaatkan secara efisien teknologi digital yang berubahannya sangat dinamis khususnya literasi (Kirchoff 2017).

Pendidikan politik di perguruan tinggi pada dasarnya tidak bisa lepas dari mata kuliah pendidikan Kewarganegaraan karena pendidikan politik terintegrasi di dalam mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Peran mata kuliah pendidikan kewarganegaraan untuk membentuk mahasiswa menjadi warga negara yang baik dan cerdas, sehingga kompetensi yang dibangun di dalam proses pembelajaran tersebut ialah

pengetahuan kewarganegaraan, keterampilan kewarganegaraan, dan sikap atau karakter kewarganegaraan. Melalui pembelajaran tersebut diharapkan setiap mahasiswa dapat berpartisipasi sebagai warga negara yang baik dan cerdas di dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, pemilihan umum, dan lain sebagainya. Hal tersebut perlu dilakukan oleh setiap warga neagra khususnya mahasiswa karena dengan adanya partisipasi politik, karena akan berimplikasi pada kualitas demokrasi di Indonesia.

Strategi Dosen dalam Memberikan Pendidikan Politik Melalui Literasi Digital

Pendidikan politik melalui pendidikan kewarganegaraan apabila memanfaatkan media pembelajaran yang berbasis digital. Literasi menjadi permasalahan bagi seluruh masyarakat di Indonesia khususnya mahasiswa sehingga dengan memanfaatkan teknologi digital dapat meningkatkan literasi mahasiswa. Hasil penelitian dari Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2019 menunjukkan Indeks literasi di Indonesia secara nasional masih

tergolong rendah, sedangkan indeks literasi di tingkat Provinsi yaitu ada 9 (sembilan) Provinsi tergolong sedang dan ada 24 (dua puluh empat) Provinsi yang tergolong masih rendah serta ada 1 (satu) Provinsi masih sangat rendah (Papua, Papua Barat dan Kalimantan Barat (Kemendikbud 2019). Berdasarkan fenomena tersebut menunjukkan bahwa literasi digital menjadi solusi dan sarana yang sangat penting untuk meningkatkan indeks literasi di Indonesia khususnya bagi mahasiswa, mengingat mahasiswa adalah generasi milenial yang tidak bisa lepas dengan teknologi internet terutama mengakses informasi melalui media sosial dengan ponselnya.

Pendidikan kewarganegaraan sebagai wahana pendidikan politik memiliki tujuan untuk membangun mahasiswa menjadi warga negara yang baik dan cerdas, yang memiliki hubungan dengan literasi digital sehingga kriteria warga negara yang diharapkan oleh pendidikan kewarganegaraan ialah 1) memiliki tingkat literasi digital yang tinggi yang berkaitan dengan fenomena sosial-kemasyarakatan, 2) aktif dalam berpartisipasi dalam berbagai kegiatan sosial-kemasyarakatan, termasuk memberikan saran dan masukan terhadap kebijakan publik, 3) bersikap kritis terhadap fenomena

sosial berdasarkan data dan fakta, 4) memiliki sikap kepedulian terhadap permasalahan masyarakat, sehingga bisa berkontribusi untuk menyelesaikan segala permasalahan masyarakat (Rahmayanti 2020). Literasi digital sangat dibutuhkan mahasiswa agar memiliki sikap kritis dalam menyikapi informasi dan interaksi, sehingga tidak terpengaruh dengan sesuatu yang belum jelas kebenarannya terutama isu-isu politik terutama pemilihan umum. Pada dasarnya literasi digital merupakan gerakan melek media yang bertujuan untuk memberikan kontrol dalam berinteraksi melalui teknologi digital. Mahasiswa yang memiliki literasi digital yang baik akan memiliki filter atau kontrol terhadap informasi yang berasal dari media online (Breakstone et al. 2018).

Peran dosen dalam penguatan literasi digital mahasiswa sangat penting, sehingga seorang dosen harus menguasai kompetensi kepribadian, pedagogik, profesional, dan sosila, namun yang terpenting adalah seorang dosen harus mampu memanfaatkan atau mengoperasikan teknologi digital, seperti media sosial. Berdasarkan observasi di dalam proses pembelajaran mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan di program studi Agroteknologi dan D-3 Kebidanan menunjukkan proses

pembelajaran mata kuliah pendidikan kewarganegaraan menunjukkan dosen dalam memberikan pendidikan politik kepada mahasiswa menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi salah satunya ialah *problem solving* dan memanfaatkan media pembelajaran berbasis digital (*Google Scholar, Facebook, Youtube, Instagram* dan lain sebagainya).

Dosen memulai dengan mempresentasikan terkait konsep-konsep pendidikan politik yang diiringi dengan tanya jawab dengan mahasiswa, selanjutnya dosen menyajikan isu-isu fenomena politik yang sedang hangat (kontestasi pemilihan umum tahun 2024). Kemudian mahasiswa di bagi menjadi beberapa kelompok untuk menganalisis isu tersebut dengan cara mendiskusikannya dengan rekan mahasiswa dan memanfaatkan literatur-literatur yang bisa diakses melalui ponsel (media sosial dan *google scholar*), yang dimiliki masing-masing mahasiswa. Setelah setiap kelompok mendiskusikan dan menganalisisnya, kemudian setiap kelompok mempresentasikan hasil analisisnya.

Mahasiswa yang berusaha menganalisis dengan teori-teori yang sudah dipelajari melalui jurnal ilmiah yang diperoleh dari *google scholar* dan

media sosial pada dasarnya tidak mudah terpengaruh dengan isu-isu politik yang sedang hangat, seperti isu terkait perpanjangan periode masa jabatan Presiden dan wakil presiden. Mahasiswa yang memiliki literasi yang kuat setelah mengambil mata kuliah pendidikan kewarganegaraan tidak mudah terpengaruh dengan isu-isu tersebut, mengingat mahasiswa tersebut memahami dasar peraturan (konstitusi) mengenai masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden. Hal tersebut selaras dengan teori yang disampaikan oleh Yuniarto dan Yudha yang menjelaskan bahwa media pembelajaran di era digital yang efektif adalah media sosial yang sudah sangat familiar di mahasiswa yang merupakan generasi milenial. Media sosial adalah media pembelajaran yang efektif dan relevan untuk mendidik mahasiswa, media sosial sebagai media pembelajaran dan pengawasan mahasiswa adalah langkah yang efektif dan efisien mengingat mahasiswa saat ini lebih banyak menghabiskan waktunya dengan dunia maya dari pada dunia nyata (Yuniarto and Yudha 2021).

Berdasarkan studi dokumen dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang digunakan oleh dosen mata kuliah pendidikan kewarganegaraan menunjukkan bahwa di dalam capaian pembelajaran lulusan dan

bahan kajian sangat berkaitan dengan pendidikan politik serta metode dan media pembelajaran yang digunakan ialah berbasis pada teknologi, dengan memanfaatkan media sosial. Bahan kajian di dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS) seperti negara hukum, konstitusi, hak dan kewajiban warga negara, sistem politik demokrasi dan lain sebagainya. Pengetahuan terkait hal tersebut merupakan salah satu tujuan pendidikan politik, seperti yang diungkapkan oleh Kansil, yang memaparkan bahwa tujuan pendidikan politik adalah untuk membangun generasi muda bangsa Indonesia yang mengetahui secara teori dan sadar akan hak dan kewajibannya serta kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, hal tersebut sebagai bentuk usaha untuk melahirkan manusia Indonesia yang seutuhnya, perwujudannya dapat dilihat dari pengetahuan, sikap, dan perilaku dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan berneagara (Pasaribu 2017).

Berdasarkan wawancara dengan mahasiswa Alfian dan Danis (Mahasiswa Agroteknologi) menunjukkan bahwa peran dosen sangat penting di dalam proses pembelajaran terutama dalam memberikan pendidikan politik

melalui literasi digital, setelah memperoleh mata kuliah pendidikan kewarganegaraan dengan memanfaatkan media sosial, mahasiswa terlihat sangat berantusias untuk belajar dan mudah memahami materi yang diberikan oleh dosen sehingga dapat mudah memahami terkait hak dan kewajiban, sistem politik demokrasi, negara hukum dan lain sebagainya. Pendidikan politik melalui literasi digital dalam mata kuliah pendidikan politik sangat efektif dan efisien.

Strategi seorang dosen mata kuliah pendidikan kewarganegaraan dalam memberikan pendidikan politik melalui literasi digital yaitu dosen mempresentasikan materi terkait pendidikan politik dengan memanfaatkan teknologi digital, menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi, memanfaatkan isu-isu terkait politik yang sedang hangat untuk didiskusikan dan dianalisis bersama mahasiswa, memberikan ruang kepada mahasiswa untuk berdiskusi, memanfaatkan *google scholar*, *Facebook*, *Instagram*, *Youtube* dan lain sebagainya sebagai media pembelajaran, dan memberi stimulus kepada mahasiswa agar mahasiswa tidak ragu dalam menyampaikan pendapatnya.

Kendala Dosen dalam Memberikan Pendidikan Politik Melalui Literasi Digital

Proses pembelajaran di dalam mata kuliah pendidikan kewarganegaraan dalam memberikan pendidikan politik melalui literasi digital memiliki kendala, sehingga hal ini membuat proses pembelajaran tidak maksimal. Berdasarkan wawancara dengan Widiatmaka dosen yang mengampu mata kuliah pendidikan kewarganegaraan menunjukkan bahwa masih ada beberapa mahasiswa yang hanya memanfaatkan ponselnya saja (*smartphone*), sehingga terkadang di dalam proses pembelajaran mahasiswa tidak fokus untuk belajar dan selalu mengakses *Watshapp*, bermain game terkadang ada yang melakukan judi online. Apabila semua mahasiswa menggunakan laptop, maka proses pembelajaran dapat berjalan dengan maksimal karena semua bisa fokus terhadap materi, selain itu pengetahuan beberapa mahasiswa terbatas terkait media yang bisa digunakan untuk penguatan literasi digital, yaitu hanya ponsel, laptop, dan computer saja. Hal tersebut relevan dengan ungkapan dari Kennedy dkk terkait keterbatasan pengetahuan mahasiswa terkait literasi digital yaitu kesadaran masyarakat khususnya peserta didik

terkait literasi digital terbatas pada penggunaan produk digital, seperti ponsel, *tablet*, komputer, dan hanya beberapa aplikasi pendukung (Kennedy et al. 2008). Di bidang pendidikan teknologi, sub disiplin literasi digital meliputi berbagai macam literasi yaitu literasi media, literasi teknologi, literasi informasi, literasi computer, literasi visual, dan literasi komunikasi (Goodfellow 2011).

Kendala selanjutnya yang dialami dosen menurut wawancara dengan Nuryadi dosen mata kuliah pendidikan kewarganegaraan adalah keterbatasan waktu, mengang banyak yang harus materi yang harus disampaikan kepada mahasiswa dan didiskusikan dengan mahasiswa, namun hanya diberi waktu 16 (enam belas) pertemuan dikurangi dengan 2 (dua) pertemuan untuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Pembelajaran jarak jauh juga menjadi suatu kendala bagi dosen dalam memberikan pendidikan politik pada mahasiswa, karena apabila menggunakan aplikasi *Goggle Meet* atau *Zoom Meeting* terkadang beberapa mahasiswa kurang serius mengikuti proses pembelajaran, dengan mematikan kamera dan apabila dipanggil dosen tidak merespon. Selanjutnya berdasarkan keterangan dari mahasiswa program studi Agroteknologi (Anggi dan

Resvan) menunjukkan bahwa masih banyak mahasiswa tidak menindaklanjuti materi yang sudah dipelajari dan didiskusikan di dalam proses pembelajaran sehingga pertemuan selanjutnya dosen harus mengulang untuk menjelaskan materi yang sudah dipelajari di pertemuan sebelumnya. Hal ini berdampak pada habisnya waktu di dalam proses pembelajaran, hanya untuk mengulang-ngulang materi. Kendala tersebut relevan dengan ungkapan yang disampaikan oleh Widiatmaka yaitu keterbatasan waktu dalam proses pembelajara sering menjadi kendala seorang dosen dalam proses pembelajaran sehingga, meskipun tujuan pembelajaran dapat tercapai namun masih kurang maksimal (Widiatmaka 2016).

Dosen mata kuliah pendidikan kewarganegaraan dalam memberikan pendidikan politik melalui literai digital memiliki beberapa kendala yaitu dalam proses pembelajaran masih ada beberapa mahasiswa yang memanfaatkan ponselnya untuk bermain game dan *chattingan* dengan teman luar kampus, keterbatasan waktu dalam proses pembelajaran mengingat banyak materi yang harus dipelajari dan didiskusikan, keterbatan pengetahuan mahasiswa terkait teknologi yang digunaka untuk penguatan literasi digital, dan kurang

fokus ketika proses pembelajaran dilakukan dengan jarak jauh (*daring*).

SIMPULAN

Pemilihan umum tahun 2019 menunjukkan bahwa banyak mahasiswa yang merupakan pemilih pemula yang golongan putih, sehingga hal ini sangat perlu dilakukan pendidikan politik kepada mahasiswa melalui mata kuliah pendidikan kewarganegaraan dengan memanfaatkan literasi digital, mengingat pemilihan umum 2024 semakin dekat. Mata kuliah pendidikan kewarganegaraan pada sangat efektif dimanfaatkan sebagai wahana pendidikan politik bagi mahasiswa, mengingat muatan materi di dalamnya berkaitan dengan hak dan kewajiban warga negara, negara hukum, demokrasi dan lain sebagainya. Strategi seorang dosen dalam memberikan pendidikan politik melalui literasi digital yaitu dosen mempresentasikan materi terkait pendidikan politik dengan memanfaatkan teknologi digital, menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi, memanfaatkan isu-isu terkait politik yang sedang hangat untuk didiskusikan dan dianalisis bersama mahasiswa, memberikan ruang kepada mahasiswa untuk berdiskusi, memanfaatkan *Google*

Scholar, *Facebook*, *Youtube*, *Twitter*, *Instagram* dan lain sebagainya sebagai media pembelajaran, dan memberi stimulus kepada mahasiswa agar mahasiswa tidak ragu dalam menyampaikan pendapatnya.

Dosen dalam memberikan pendidikan politik melalui literasi digital memiliki beberapa kendala yaitu dalam proses pembelajaran masih ada beberapa mahasiswa yang memanfaatkan ponselnya untuk bermain game dan *chattingan* dengan teman luar kampus, keterbatasan waktu dalam proses pembelajaran mengingat banyak materi yang harus dipelajari dan didiskusikan, keterbatasan pengetahuan mahasiswa terkait teknologi yang digunakan untuk penguatan literasi digital, dan kurang fokus ketika proses pembelajaran dilakukan dengan jarak jauh.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah mencurahkan segala karunia kepada penulis. Tidak lupa kami haturkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua kami yang telah mendidik dan mendorong penulis untuk selalu berkarya. Ucapan terima kasih juga kami haturkan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas

Sebelas Maret yang telah memberikan bantuan hibah penelitian dengan nomor kontrak 228/UN27.22/PT.01.03/2023.

PUSTAKA ACUAN

- Ahmad, Taufiq, Aima Alvi, and Muhammad Ittefaq. 2019. "The Use of Social Media on Political Participation Among University Students: An Analysis of Survey Results from Rural Pakistan." *Sage Open* 9(3):1–9. doi: 10.1177/2158244019864484.
- Anggraeni, Dewi, and Adrinoviarini Adrinoviarini. 2020. "Strategi Pengawasan Terhadap Ujaran Kebencian Di Media Sosial Pada Pemilu." *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum* 1(2):99–116. doi: <https://doi.org/10.47776/alwasath.v1i2.60>.
- Aprilia, Cici Riska, and Alia Azmi. 2021. "Sosialisasi Pemilu Tahun 2019 Terhadap Pemilih Pemula Oleh KPU Kabupaten Solok Selatan." *Journal of Civic Education* 4(1):32–38. doi: 10.24036/jce.v4i1.439.
- Azirah. 2019. "Partisipasi Politik Pemilih Pemula Dalam Pesta Demokrasi." *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam* 6(2):86–100. doi: 10.32505/politica.v6i2.2735.
- Bachmid, Fahri. 2020. "Eksistensi Kedaulatan Rakyat Dan Implementasi Parliamentary Threshold Dalam Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia." *SIGn Jurnal Hukum* 2(2):87–103. doi: 10.37276/sjh.v2i2.83.
- Breakstone, Joel, Sarah McGrew, Mark Smith, Teresa Ortega, and Sam Wineburg. 2018. "Why We Need a New Approach to Teaching Digital Literacy." *Phi Delta Kappan* 99(6):27–32. doi: <https://doi.org/10.1177/0031721718762419>.
- Dewantara, Jagad Aditya, Ilham Fajar Suhendar, Rum Rosyid, and Thomy Sastra Atmaja. 2019. "Pancasila as Ideology and Characteristics Civic Education in Indonesia." *International Journal for Educational and Vocational Studies* 1(5):400–405.
- Dewi, Utari, Alim Sumarno, and Lamijan Hadi Susarno. 2022. "Pembelajaran Daring Untuk Mendukung Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)." *Kwangsan: Jurnal Teknologi Pendidikan* 10(01):1–14. doi: <https://doi.org/10.31800/jtp.kw>.
- Ekayana, Anak Agung Gde. 2022. "Flipped Learning Berbasis Project Terhadap Berpikir Kreatif Dan Prestasi Belajar Di Pendidikan Tinggi." *Kwangsan: Jurnal Teknologi Pendidikan* 10(2):164–82. doi: 10.31800/jtp.kw.v10n2.p164--182.
- Goodfellow, Robin. 2011. "Literacy, Literacies and the Digital in Higher Education." *Teaching in Higher Education* 16(1):131–44. doi: <https://doi.org/10.1080/13562517.2011.544125>.

- Handoyo, Eko, and Puji Lestari. 2017. *Pendidikan Politik*. Yogyakarta: Pohon Cahaya.
- Hardian, Mirza, Yayuk Hidayah, Anis Suryaningsih, and Yoga Ardian Feriandi. 2021. "Gagasan Pendidikan Politik Bagi Generasi Muda (Sebuah Kajian Literatur)." *Briliant: Jurnal Riset Dan Konseptual* 6(3):552. doi: 10.28926/briliant.v6i3.653.
- Juwandi, Ronni, Yasin Nurwahid, and Ayu Lestari. 2019. "Media Sosial Sebagai Sarana Pendidikan Politik Untuk Mengembangkan Literasi Digital Warga Negara." Pp. 369–78 in *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan FKIP*. Vol. 2.
- Kemendikbud. 2019. *Indeks Aktivitas Literasi Membaca 34 Provinsi*.
- Kennedy, Gregor E., Terry S. Judd, Anna Churchward, Kathleen Gray, and Kerri-Lee Krause. 2008. "First Year Students' Experiences with Technology: Are They Really Digital Natives?" *Australasian Journal of Educational Technology* 24(1):108–22. doi: <https://doi.org/10.14742/ajet.1233>.
- Kirchoff, Jeff. 2017. "Using Digital Comics to Develop Digital Literacy: Fostering Functionally, Critically, and Rhetorically Literate Students." *Texas Journal of Literacy Education* 5(2):117–29.
- Miles, Huberman & Saldana, Jhonny. 2014. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. 3rd ed. London: SAGE Publications.
- Nurdiansyah, Edwin. 2015. "Implementasi Pendidikan Politik Bagi Warga Negara Dalam Rangka Mewujudkan Demokratisasi Di Indonesia." *Jurnal Bhineka Tunggal Ika* 2(implementasi pendidikan politik):54–58.
- Nuryadi, Muhammad Hendri, and Pipit Widiatmaka. 2022. "Analisis Proses Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Membentuk Karakter Anak Didik Di Masa Pandemi Covid-19." *Jurnal Moral Kemasyarakatan* 7(1):22–31. doi: <https://doi.org/10.21067/jmk.v7i1.6558>.
- Nuryadi, Muhammad Hendri, Zamroni, and Suharno. 2020. "The Pattern of the Teaching of Multiculturalism-Based Civics Education: A Case Study at Higher Education Institutions." *European Journal of Educational Research* 9(2):799–807. doi: 10.12973/eu-jer.9.2.799.
- Pahlevi, Moch Edward Trias, and Azka Abdi Amrurrobi. 2020. "Pendidikan Politik Dalam Pencegahan Politik Uang Melalui Gerakan Masyarakat Desa." *Jurnal Antikorupsi Integritas* 6(1):141–52. doi: <https://doi.org/10.32697/integritas.v6i1.611>.
- Pasaribu, Payerli. 2017. "Peranan Partai Politik Dalam Melaksanakan Pendidikan Politik The Role of Political Parties In Conducting Political Education." *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik*

- 5(1):51–59. doi: 10.31289/jppuma.v5i1.1125.
- Pratiwi, Shafina Ade, and Eka Khristiyanta Purnama. 2022. "Integrasi Teknologi Dalam Pendidikan Di Masa Pandemi Covid-19." *Kwangsan: Jurnal Teknologi Pendidikan* 10(1):131–46. doi: 10.31800/jtp.kw.v10n1.p131--146.
- Rahman, Asmika. 2018. "Konsep Dasar Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula Melalui Pendidikan Kewarganegaraan." *JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial* 10(1):44–51.
- Rahman, Asmika, and Suharno Suharno. 2020. "Pelaksanaan Pendidikan Politik Melalui Pembelajaran Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Untuk Meningkatkan Kesadaran Politik Siswa." *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 4(2):282–90. doi: <http://dx.doi.org/10.17977/um019v4i2p282-290>.
- Rahmayanti, Esty. 2020. "Penguatan Literasi Digital Untuk Membentuk Karakter Kewarganegaraan Digital Melalui Pendidikan Kewarganegaraan." Pp. 79–86 in *Prosiding Seminar Nasional Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Universitas Ahmad Dahlan.
- Safitri, Eva. 2019. "LSI Denny JA: Golput Pilpres 19,27%, Golput Pileg 30,05%." *Detik.Com* detik.com. Retrieved February 2, 2023 (<https://news.detik.com/berita/d-4516324/lsi-denny-ja-golput-pilpres-1927-golput-pileg-3005>).
- Wahyudi, Tian. 2021. "Penguatan Literasi Digital Generasi Muda Muslim Dalam Kerangka Konsep Ulul Albab." *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian Dan Kajian Sosial Keagamaan* 18(2):161–78. doi: 10.46781/al-mutharahah.v18i2.368.
- Widiatmaka, Pipit. 2016. "Kendala Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Membangun Karakter Peserta Didik Di Dalam Proses Pembelajaran." *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan* 13(2):188–98. doi: 10.21831/civics.v13i2.12743.
- Widiatmaka, Pipit, and Arief Adi Purwoko. 2021. "Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Wahana Untuk Membangun Karakter Toleransi Di Perguruan Tinggi." *WASKITA: Jurnal Pendidikan Nilai Dan Pembangunan Karakter* 5(1):171–86. doi: <https://doi.org/10.21776/ub.waskita.2021.005.02.8>.
- Widiatmaka, Pipit, and Abd Muid Aris Shofa. 2022. "Strategi Mata Kuliah Pendidikan Pancasila Dalam Membentuk Karakter Nasionalisme Mahasiswa Di Era Society 5.0." *Jurnal Civic Hukum* 7(2):110–22. doi: <https://doi.org/10.22219/jch.v7i2.21595>.
- Winarno. 2019. *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: Bumi Aksara.

- Winarno, Rusnaini, Moh Muchtarom, Erna Yuliandri, Machmud Al Rasyid, and Anis Suryaningsih. 2020. "Analisis Kesulitan Guru PPKn Dalam Mengembangkan Materi Pembelajaran Bhinneka Tunggal Ika." *Journal of Moral and Civic Education* 4(2):97–112. doi: <https://doi.org/10.24036/8851412422020510>.
- Yuliono, Anton. 2013. "Kepercayaan Masyarakat Pada Partai Politik (Studi Kasus Kecenderungan Golongan Putih Pada Pemilihan Kepala Daerah Di Wilayah Surabaya)." *Jurnal Administrasi Publik (DIA)* 11(1):173–84.
- Yuniarto, Bambang, and Rivo Panji Yudha. 2021. "Literasi Digital Sebagai Penguatan Pendidikan Karakter Menuju Era Society 5.0." *Edueksos : Jurnal Pendidikan Sosial & Ekonomi* 10(2):176–94. doi: [10.24235/edueksos.v10i2.8096](https://doi.org/10.24235/edueksos.v10i2.8096).